

PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN KERINCI

DARA KURNIA SARI, S.A.P¹,
M. DHANY AL SUNAH, S.Pd., M.Pd², ARDIANTO ARSAN, S.Sos., M.Si³

STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email :

darakurniasari@gmail.com

mdhanyalsunah@gmail.com

ardiantoarsan@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted at the Sungai Penuh City Regional Disaster Management Agency (BPBD) Office. The handling of flood disasters has not been carried out to the maximum because it is suspected that there is still the handling of flood disasters that are lacking in the community affected by the flood disaster and the role of stakeholders in managing floods is not yet optimal. The research problem formulation is, what is the role of stakeholders in the framework of flood management in Sungai Penuh City? The research objective is to find out the role of stakeholders in the context of flood management in Sungai Penuh City. This research uses a qualitative approach where data is obtained through field interview guidelines to 5 informants who refer to the research indicators, namely 1. Prevention 2. Warning 3. Preparedness 4. Disaster Impact 5. Response. 6. Recovery 7. Development. The data obtained in the field were analyzed based on the classification of the informant's answers described in the results and discussion of the research which was then interpreted by the researcher. it is known that the Role of Stakeholders in Handling Flood Disasters in Sungai Penuh City there are 5 indicators of the framework of thinking that have not been maximally implemented, namely the indicators of Prevention, Warning, Preparedness, Disaster Impacts and Discipline while for the Response and Development indicators have been implemented to the maximum. For this reason, the authors suggest that the role of stakeholders in handling flood disasters in Sungai Penuh City can be improved so that facilities and infrastructure as well as houses that are damaged due to flood disasters can be overcome properly.

Keywords: *Role of Stakeholders, Flood Disaster Management*

ABSTRAK

Penanganan bencana banjir belum dilaksanakan dengan maksimal karena diduga masih adanya Penanganan bencana banjir yang kurang terhadap masyarakat kena musibah bencana banjir dan belum maksimalnya peranan stakeholders dalam menangani bencana banjir. Rumusan masalah penelitian yaitu, bagaimanakah peranan *Stakeholder* dalam rangka penanganan bencana banjir di Kota Sungai Penuh? Tujuan penelitian yaitu, Untuk mengetahui peranan *Stakeholder* dalam rangka penanganan bencana banjir di Kota Sungai Penuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diperoleh melalui pedoman wawancara lapangan kepada 5 orang informan yang mengacu kepada indikator penelitian yaitu 1. Pencegahan 2. Peringatan 3. Kesiapsiagaan 4. Dampak Bencana 5. Tanggapan. 6. Pemulihan 7. Pembangunan. Data yang diperoleh lapangan dianalisis berdasarkan pengklasifikasian jawaban informan yang diuraikan dalam hasil dan pembahasan penelitian yang kemudian dilakukan interpretatif peneliti. diketahui bahwa Peranan *Stakeholders* Dalam Penanganan Bencana Banjir di Kota Sungai Penuh ada 5 indikator dari kerangka pemikiran yang belum terlaksana secara maksimal yaitu indikator Pencegahan, Peringatan, Kesiapsiagaan, Dampak Bencana, dan Pemulihan sedangkan untuk indikator Tanggapan dan Pembangunan sudah terlaksana dengan maksimal. Untuk itu penulis menyarankan agar Peranan *Stakeholders* dalam penanganan bencana

banjir di Kota Sungai Penuh dapat ditingkatkan agar sarana dan prasarana serta rumah yang rusak karena bencana banjir dapat teratasi dengan baik.

Kata Kunci : Peranan *Stakeholders*, Penanganan Bencana Banjir

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan mewujudkan nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional.

Pelaksanaan pembangunan mewujudkan aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Pelaksanaan pembangunan di Indonesia secara sederhana dibedakan dalam bentuk pembangunan sektoral dan regional.

Pembangunan pada dasarnya tidak dapat di lepaskan hubungannya dengan keadaan Negara yang sedang membangun itu sendiri. Banyak persoalan yang dihadapi oleh negara Indonesia dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan hal yang “berusia lanjut” dapat dikatakan bahwa “pembangunan” merupakan kunci yang menentukan hidup matinya bangsa Indonesia. Di Indonesia masalah penduduk tergolong sangat serius disamping merupakan Negara yang relatif belum sejahtera secara ekonomi jika dibandingkan dengan negara tetangga. Kepadatan penduduk juga sangat tinggi dan perkembangan penduduk yang tergolong sangat cepat.

Oleh karena itu, mengadakan pembangunan ekonomi di negara Indonesia merupakan suatu keperluan yang sangat mendesak, yaitu untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengisi kemerdekaan dalam bidang politik dengan pembangunan ekonomi. Pada saat ini, banyak para pemikir-pemikir ekonomi yang memberikan kontribusi pemikirannya dalam berbagai aspek mengenai pembangunan ekonomi untuk di terapkan di Indonesia.

Dalam Garis-Garis Dalam Besar Haluan Negara disebutkan bahwa pembangunan bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa yang adil dan makmur. Dilihat lebih jauh tujuan-tujuan pembangunan yang dicanangkan banyak mengkaji masalah peningkatan diberbagai sektor. Apabila dicermati, maka tujuan sebenarnya pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan.

Pembangunan sektoral lazimnya merupakan realisasi dari rencana pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan kepentingan nasional. Seperti pembangunan dalam struktur perekonomian. Sedangkan pembangunan regional adalah strategi pemerintah

nasional dalam menjalankan campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya proses pembangunan di daerah-daerah sebagai bagian dari daerah nasional supaya terjadi perkembangan kearah yang dikehendaki. Pembangunan regional merupakan realisasi pembangunan sesuai skala prioritas pembangunan di tingkat daerah. Dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan suatu proses yang harus dilaksanakan melalui tahapan-tahapan untuk dapat memaksimalkan sasaran pembangunan. Tahapan yang paling awal dan merupakan tahapan yang paling vital adalah tahap perencanaan. Sebagai tahapan awal, tahap perencanaan akan menjadi pedoman ataupun acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu perencanaan tersebut harus bersifat implementatif agar pembangunan nasional benar-benar dapat diterapkan dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat .

Pemerintah merupakan pihak yang paling penting dan berperan sebagai penggerak dalam pembangunan, yaitu melalui perencanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, baik meliputi pembangunan nasional ataupun pembangunan di beberapa daerah diharapkan adanya keharmonisan Dalam rangka terciptanya *good government*, maka penting adanya efektivitas dan efisiensi dari setiap lembaga pemerintahan. Untuk itu, diperlukan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat, khususnya lembaga pengawasan guna melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah.

Pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif yang terpadu dan serasi.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah memberikan otonomi pada pemerintah daerah yang dimaksudkan agar daerah dapat mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Pembangunan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada Pasal 18 UUD 1945, dimana daerah Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan oleh pemerintah serta untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil guna. Demikian halnya dengan pemerintahan daerah, mengingat bahwa pemerintahan daerah merupakan suatu organisasi yang memerlukan pengelolaan yang baik, maka pengawasan mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Di dalam suatu pemerintahan daerah, pengawasan merupakan suatu usaha penertiban untuk menjamin terlaksananya segala ketentuan undang-undang, keputusan, kebijaksanaan, dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu

sendiri. Lewat pengawasan yang baik dapat mengatasi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana itu sendiri maupun sebagai bahan informasi

Untuk mencapai tujuan dari organisasi secara optimal, maka diperlukannya aspek manajemen suatu organisasi tersebut agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu pula pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Informasi tersebut dapat digunakan untuk Sebagaimana pada Ketetapan Nomor IX/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka Pengawasan merupakan aspek penting dalam manajemen kepegawaian, melalui Sosialisasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14. Permenpan/14/P.PAN/2016, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah ditegaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur terpenting dalam rangka peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Inspektorat merupakan instansi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai lembaga pengawasan di daerah. Inspektorat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah (Gubernur/ Bupati/ Walikota) melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD serta memperbaiki kesalahan kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.

Begitu juga hal nya dengan pemerintahan Kabupaten Kerinci perlu adanya pengawasan yang maksimal dari inspektorat yang memang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, seperti pengawasan dalam bentuk Pengendalian internal guna menjamin mutu penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan penyelenggaraan daerah. Ini merupakan suatu keharusan dan kebutuhan bagi aparat pengawas hal tersebut penting guna membahas berbagai hal yang dihadapi oleh pemerintah daerah terutama dalam hal pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat mewujudkan Pemerintah Daerah yang akuntabel, meningkatkan pencegahan korupsi , menciptakan kinerja aparat pemerintah yang efisien dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang optimal dan adanya integrasi dan perpaduan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dimana dari pengamatan awal dapat diindikasikan belum maksimalnya pengawasan inspektorat seperti fenomena di bawah ini:

1. Belum maksimalnya pengawasan inspektorat dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kerinci, seperti pembangunan jalan dan drainase yang sudah dilakukan belum sepenuhnya dapat menghindari masalah banjir karena pekerjaannya yang tidak maksimal.

2. Kurang tanggapnya inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap perbaikan-perbaikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai yang terkesan lemah dalam memberikan sanksi, seperti pegawai yang tidak kerja sehari-hari tidak diberikan tindakan yang tegas.
3. Pelaksanaan program pembangunan yang tidak tepat sehingga terkesan mubazir seperti lapangan merdeka yang terus dilakukan rehap tetapi hasilnya bukan tambah canggih malahan tambah tidak jelas dari tema pembangunan lapangan merdeka yang telah dikerjakan.
4. Penyelenggaraan pemerintahan tidak maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masih adanya unsur-unsur korupsi, seperti penerimaan pegawai dan dalam pelayanan pengurusan surat-surat ataupun sertifikat pertanahan.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian Yang Digunakan

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Kualitatif yaitu meneliti suatu objek penelitian dengan mengkaji secara keseluruhan dan mendalam bukan melihat hubungan dua variabel atau lebih. Dimana hasil penelitian akan diolah berdasarkan interpretatif peneliti dan diuraikan dalam bentuk deskriptif. Lexy J.Moleong (2009: 21)

Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam hal ini adalah kepala dan staf pegawai yang bekerja di Inspektorat Kabupaten Kerinci yang berjumlah 8 orang.

Data Yang Akan Diambil

1. Data Primer

Data primer dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

2. Data Sekunder

Berupa data-data yang telah ada seperti arsip-arsip, dokumen, artikel, serta laporan yang berhubungan dengan objek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data Yang Digunakan

Dalam melakukan penelitian, data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data-data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat.

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumentasi
- d. Triangulasi

Alata Pengumpulan Data

Adapun alat yang di gunakan dalam penelitian ini :

1. Daftar pertanyaan / daftar wawancara
2. Laptop
3. Pena, buku tulis/kertas
4. Alat perekam

Unit Analisis

Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Inspektorat Kabupaten Kerinci.

Analisis Data

Menurut Miles dalam Emzir (2010 : 129) Analisa data ada tiga cara yaitu :

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat diverifikasi. Data kualitatif dapat direduksi dan ditransformasikan dalam banyak cara yaitu melalui seleksi halus, melalui rangkuman atau parafrase.

b. Model data (data display)

Langkah kedua dari kegiatan analisis data merupakan model data. Model (display) dalam kehidupan sehari-hari berbeda-beda dari pengukuran bensin, surat kabar, sampai layar computer. Melihat sebuah tanyangan membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu-analisis lanjutan atau tindakan didasarkan pada pemahaman tersebut.

Bentuk yang paling sering dimodel data kualitatif selama ini adalah *teks naratif*. Manusia tidak terlalu kuat sebagai pemroses dari sejumlah besar informasi ; tendensi kognitif merupakan mereduksi informasi yang kompleks kedalam berbagai gestal yang dipilih atau konfigurasi-konfigurasi yang mudah dipahami. Model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan.

Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang mana, harus dimasukkan kedalam sel yang mana merupakan aktivitas analisis.

c. Penarikan kesimpulan/Verifikasi

Langkah ketiga dari aktivitas analisis merupakan penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan akhir tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, penyimpangan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan tuntutan dari penyandang dan tetapi kesimpulan bahkan ketika seorang menyatakan telah memproses secara induktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan

Wawancara dengan informan tentang, Bagaimanakah pengawasan inspektorat dalam perumusan kebijakan teknis?

Dari jawaban informan dapat diinterpretasikan bahwa pengawasan inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan terhadap perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan sudah dilaksanakan dengan maksimal hal ini disimpulkan dari jawaban informan yang hampir sama dalam memberikan jawaban dimana pengawasan inspektorat telah dilakukan dengan maksimal agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Wawancara dengan informan tentang, Bagaimanakah pengawasan inspektorat dalam bidang pengawasan? Dari jawaban informan dapat diinterpretasikan bahwa pengawasan inspektorat dalam bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sudah dilaksanakan dengan maksimal. dimana pengawasan inspektorat telah dilakukan dengan maksimal agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan

dengan baik yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah sehingga tercapai apa yang telah menjadi visi dan misi dari pemerintah Kabupaten Kerinci

Wawancara dengan informan tentang, Bagaimanakah pengawasan inspektorat dalam fasilitas pengawasan ? Dari jawaban informan dapat diinterpretasikan bahwa pengawasan inspektorat dalam fasilitas pengawasan sudah dilaksanakan dengan maksimal dari semua jawaban informan dapat dijelaskan dimana penyelenggaraan pemerintahan sudah dilakukan dengan baik dan diawasi oleh pihak inspektorat. Inspektorat dalam hal ini melakukan pengawasan sudah berdasarkan tupoksi dan aturan yang telah ditetapkan agar pemerintahan dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan baik oleh aparat ataupun oleh pegawai dan disinilah tugas inspektorat untuk melakukan pengawasan dan akan mengevaluasi setiap pelanggaran-pelanggaran apabila ada dilakukan oleh aparat pemerintah

2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan daerah melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

Wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah pengawasan inspektorat dalam Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan daerah melalui audit dan revidu? Dari jawaban informan dapat diinterpretasikan bahwa pengawasan Inspektorat dalam melakukan audit dan revidu terhadap penggunaan keuangan daerah telah dilakukan sesuai dengan tupoksinya terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah pengawasan inspektorat dalam Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan daerah melalui evaluasi dan pemantauan? Dari jawaban informan dapat diinterpretasikan bahwa pengawasan Inspektorat dalam melakukan audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya terhadap laporan keuangan telah dilakukan dengan baik agar tidak terjadinya penyimpangan dengan memberikan laporan keuangan yang tidak wajar dan fungsi ini mengantisipasi agar pengelolaan keuangan daerah betul-betul penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sesuai apa yang telah direncanakan dalam perencanaan pembangunan masyarakat Kabupaten Kerinci, disini tugas inspektorat dalam melakukan pengawasan sangatlah penting agar aparat-aparat yang bertugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan inspektorat secara kontinyu, roda pemerintahan Kabupaten Kerinci dapat dijalankan dengan maksimal sesuai dengan perencanaan pemerintah yang telah ditetapkan.

Wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah pengawasan inspektorat dalam Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan daerah melalui kegiatan pengawasan lainnya? Dari jawaban informan dapat diinterpretasikan bahwa pengawasan Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap pengawasan lainnya terhadap laporan keuangan telah dilakukan dengan. Penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sesuai apa yang telah direncanakan dalam perencanaan pembangunan masyarakat Kabupaten Kerinci, disini tugas inspektorat dalam melakukan pengawasan sangatlah penting agar aparat-aparat yang bertugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati

Wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah pengawasan inspektorat dalam pelaksanaan penugasan wali kota? Dari jawaban informan dapat diinterpretasikan bahwa pengawasan Inspektorat untuk penugasan bupati agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik inspektorat terus melakukan pengawasan agar tugas yang diberikan oleh bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan dengan baik penuh tanggungjawab dan disiplin yang tinggi demi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan

sesuai dengan visi dan misi dari Kabupaten Kerinci itu sendiri dan ini merupakan tanggung jawab inspektorat agar aparatur-aparatur yang diberikan tugas dapat menjalankannya sesuai dengan aturan dan yang telah ditetapkan.

Wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah pengawasan inspektorat dalam pelaksanaan tujuan tertentu? Dari jawaban informan dapat diinterpretasikan bahwa pengawasan Inspektorat untuk tujuan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksinya.

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan

Wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah pengawasan inspektorat dalam penyusunan laporan hasil pengawasan? Dari jawaban informan dapat diinterpretasikan bahwa pengawasan Inspektorat dalam penyusunan laporan hasil pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan dengan baik penuh tanggungjawab dan disiplin yang tinggi demi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan sudah dilaksanakan dengan baik dimana hal ini merupakan tanggung jawab inspektorat agar aparatur-aparatur yang diberikan tugas dapat menjalankannya sesuai dengan aturan dan yang telah ditetapkan.

Wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah pengawasan inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan laporan pengawasan ? Dari jawaban informan dapat diinterpretasikan bahwa pengawasan Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan laporan pengawasan sudah dijalankan dengan baik dimana inspektorat terus melakukan pengawasan agar tugas yang diberikan oleh bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan laporan pengawasan dimana hal ini merupakan tanggung jawab inspektorat agar aparatur-aparatur yang diberikan tugas dapat menjalankannya sesuai dengan aturan dan yang telah ditetapkan

Wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah penyelenggaraan pemerintah dalam penyusunan laporan hasil pengawasan? Dari jawaban informan dapat diinterpretasikan bahwa pengawasan Inspektorat dalam penyusunan laporan hasil pengawasan untuk tujuan tertentu sudah dilakukan dengan baik penuh tanggungjawab dan disiplin yang tinggi demi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan aturan dan tupoksi yang telah ditetapkan

5. Pelaksanaan administrasi inspektorat Kabupaten

Wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah pengawasan inspektorat dalam pelaksanaan administrasi di inspektorat kota? Dari jawaban informan dapat diinterpretasikan bahwa pengawasan pelaksanaan administrasi inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintah telah dilakukan secara baik berdasarkan aturan dan tupoksinya.

Wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah pengawasan inspektorat dalam administrasi di inspektorat ? Dari jawaban informan dapat diinterpretasikan bahwa pengawasan pelaksanaan administrasi di inspektorat Kabupaten Kerinci sudah dilakukan dengan optimal yaitu setiap elemen terkait telah memahami tugas-tugas mereka dibantu oleh badan inspektorat daerah Kabupaten Kerinci sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah pengawasan inspektorat dalam pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya? Dari jawaban informan dapat diinterpretasikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi lainnya telah dilakukan secara aturan yang berlaku terhadap kinerja pegawai sudah dilakukan dengan optimal yaitu setiap elemen terkait telah memahami tugas-tugas mereka dan adanya tindak lanjut terhadap pegawai dalam suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab.

IV. SIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dari lima indikator penelitian yang diujikan dengan 6 pertanyaan pedoman wawancara tentang pengawasan inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan di kantor inspektorat Kabupaten Kerinci sudah terlaksana dengan baik yaitu :

1. Pengawasan inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintah untuk indikator perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik dan merupakan tugas yang dilakukan untuk membantu pimpinan atau bupati dalam menjalankan roda pemerintahan agar dapat terlaksana berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan dan para aparatur negara dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing
2. Pengawasan inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintah untuk indikator pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan daerah melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya sudah dilaksanakan sesuai dengan tugasnya, karena ini merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap anggaran daerah agar dapat berjalan baik melalui pengawasan oleh inspektorat agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah.
3. Pengawasan inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintah untuk indikator pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan penugasan oleh bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan kepada inspektorat sebagai perpanjangan tangan bupati dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Kerinci
4. Pengawasan inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintah untuk indikator penyusunan laporan hasil pengawasan sudah dilakukan dengan maksimal dimana inspektorat sebagai badan yang melakukan pengawasan telah melaporkan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kerinci.
5. Pengawasan inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintah untuk indikator pelaksanaan administrasi inspektorat daerah, telah dilaksanakan dengan baik dimana administrasi dalam pengawasan pegawai pada setiap organisasi di Kabupaten Kerinci dilakukan pengawasan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya dan akan diberikan sanksi bagi yang melakukan penyimpangan baik terhadap pegawai yang melakukan penyimpangan disiplin kerja dan yang tidak menjalankan dengan penuh tanggung jawab.
6. Pengawasan inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintah untuk indikator pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya juga sudah dilaksanakan dengan maksimal, dimana inspektorat sebagai perpanjangan tangan bupati melakukan pengawasan terhadap organisasi-organisasi yang mendapat tugas dari bupati terus dilakukan pengawasan secara kontinyu demi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Kerinci sejalan dengan visi dan misinya

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bugin, B 2013, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers : Jakarta.
- Danim, Sudarwan. 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia. Bandung
- Finer, S. E. 2014. *Comparative Government*. Penguin Books, Ltd., Harmonds Worth, England.
- Labolo, M 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Erlangga. Jakarta
- Mahmudin. 2010, *Menanti APBD berbasis Partisipasi Masyarakat*,
- Mali. E. 2012. *Kepemimpinan Transformasional Dalam Birokrasi Pemerintahan*. Jakarta: PT. Multicerdas Publishing.
- Miles dan Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Moh Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi. 2008, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Nadraha, T. 2013. *Kibernetologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Bandung: PT. Rineka Cipta.
- Noor Gemilang Siradja 2015 *Analisis Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah Tentang Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau*. Jurnal Ilmiah Tidak Di publikasikan.
- Osborne, D dan Plastrik, P. 2013. *Memangkas Birokrasi*. Jakarta : Pustaka Binaman Presindo.
- Rahmad Abdul. 2011. *Administrasi Pemerintah Dalam Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Rasyid. R. M. 2013. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Syafie,I. K. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian kuantitatif da kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung

- Sonny Sumarsono, S., 2010. *Teori dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Graha Ilmu
- Sugono, Dendy dkk. 1998. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta
- Suriansyah, 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Pustaka Pelajar.
- Taliziduhu Ndharu, 2013. *Ilmu Pemerintahan* . Jakarta: BKU IIP.
- Terry. G. R. 2007. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- UU.No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UUD 1945 Pasal 18 Tentang Pembangunan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah.
- Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998. Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN
- Kepmenpan Nomor Kep/46/M.PAN/4/2004. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan
- Permendagri Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1999. Tentang Penyelenggaraan Negara.
- Peraturan Kabupaten Kerinci Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Inspektorat Kabupaten Kerinci.